

Judul : Dapat pembagian 92 persen, pengemudi ojol belum sejahtera
Tanggal : Minggu, 05 Juli 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Dapat Pembagian 92 Persen Pengemudi Ojol Belum Sejahtera

FOTO: FB PRIBADI



Cucun Ahmad Syamsurijal

SENAYAN mendorong Pemerintah membuat aturan teknis terkait kebijakan pembagian pendapatan sebesar 92 persen bagi pengemudi ojek online (ojol) dan 8 persen bagi perusahaan aplikasi.

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, kesepakatan antara Pemerintah, DPR, dan perusahaan aplikasi mengenai skema pembagian pendapatan tersebut pada prinsipnya telah diumumkan. Namun, dalam pelaksanaannya muncul persoalan baru berupa penyesuaian tarif yang berdampak pada penurunan pendapatan sebagian pengemudi.

"Kondisi tersebut memberikan keuntungan bagi konsumen karena biaya perjalanan menjadi lebih murah. Tapi merugikan pengemudi ojol," ujar Cucun di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Sebelumnya, kebijakan komisi maksimal 8 persen untuk perusahaan aplikasi dan 92 persen untuk pengemudi ojol resmi berlaku pada 1 Juli 2026. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 1 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Buruh Internasional.

Cucun melanjutkan, diperlukan regulasi teknis dari Pemerintah agar implementasi kebijakan tersebut tetap sejalan dengan semangat meningkatkan kesejahteraan pengemudi. Tentunya tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat sebagai pengguna layanan.

"Kementerian Perhubungan (Kemhub) perlu membuat aturan teknis yang lebih detail. Komisi V DPR juga akan menindaklanjuti supaya tidak terjadi pemahaman yang salah," kata politisi PKB ini.

DPR, tambah Cucun, akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Koordinasi antara Pemerintah, DPR dan perusahaan aplikasi penting dilakukan agar komitmen yang telah disepakati benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh pihak.

Karena itu, penyusunan aturan teknis diharapkan dapat memberikan kepastian dalam penerapan skema pembagian pendapatan. "Tentunya juga menjaga keseimbangan antara kepentingan pengemudi, perusahaan aplikasi, dan masyarakat pengguna jasa transportasi daring," ucap legislator asal Jawa Barat (Jabar) ini.

Senada, Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda mendesak Pemerintah segera menyusun payung hukum permanen terkait pembagian pendapatan sebesar 92 persen bagi pengemudi ojol dan 8 persen bagi perusahaan aplikasi. Karena kebijakan itu perlu diperkuat melalui regulasi agar memberikan kepastian hukum bagi pengemudi ojol.

"Presiden mengambil keputusan yang tidak mudah dengan mempertimbangkan berbagai risiko, tetapi tetap memilih berpihak kepada para pengemudi ojol," kata Huda di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (2/7/2026). ■ TIF